

PERENCANAAN BAHASA DI INDONESIA DAN FUNGSINYA SEBAGAI PEMERSATU KEBERAGAMAN BAHASA

Silvia Melati¹
SMAN 5 Malang

E-mail: silviamelati.sm@gmail.com

Abstrak: Perencanaan bahasa adalah segala usaha yang digunakan untuk melestarikan sebuah bahasa baik dengan cara menambah kosakata, ejaan, dan pembuatan kamus. Di Indonesia, perencanaan bahasa di mulai pada 28 Oktober 1928 dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Pada butir ketiga disebutkan bahwa "*bahasa persatoean Bahasa Indonesia.*" Oleh karena itu, bahasa Indonesia dijadikan bahasa negara. Dengan adanya bahasa Indonesia sangat memudahkan komunikasi antarsuku dengan bahasa yang berbeda. Bahasa negara perlu dibedakan dengan bahasa resmi. Jika bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang digunakan pada situasi apapun, maka bahasa resmi digunakan pada konteks formal yang menggunakan ragam baku.

Kata Kunci: perencanaan bahasa, sumpah pemuda, ragam baku

HAKIKAT PERENCANAAN BAHASA

Perencanaan bahasa merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tentang segala usaha yang dilakukan untuk melestarikan atau menumbuhkembangkan bahasa dan melibatkan usaha pembinaan, pembakuan, dan pengaturan atas bahasa sasaran (Haugen dalam Muslich dan Oka, 2010:20). Chaer dan Agustina (2010:185) menambahkan dan memandang bahwa perencanaan bahasa merupakan usaha untuk membuat penggunaan bahasa dalam suatu negara di masa depan dengan lebih baik dan terarah. Dari kedua pengertian tersebut memberikan pengertian perencanaan bahasa sebagai usaha yang dilakukan untuk membuat penggunaan suatu bahasa yang dianggap sah atau baku dalam suatu masyarakat dalam suatu negara. Artinya, perencanaan bahasa yang dilakukan adalah untuk membentuk dan

memelihara suatu bahasa untuk kepentingan komunikasi nasional (bahasa nasional).

Menurut Weinstein (dalam Wardhaugh, 1980), perencanaan bahasa adalah pemerintah yang berwenang, jangka panjang, berkelanjutan, dan usaha sadar untuk mengubah fungsi bahasa di masyarakat untuk tujuan pemecahan masalah komunikasi. Hal ini mungkin melibatkan menilai sumber, kompleks pengambilan keputusan, tugas fungsi yang berbeda untuk bahasa atau varietas dari bahasa dalam komunitas yang berbeda, dan komitmen sumber daya yang berharga. Berbeda dari dua pengertian di atas, pengertian tentang perencanaan bahasa ini memberikan arti bahwa perencanaan bahasa berlangsung dalam sebuah komunitas bahasa namun di bawah kewenangan pemerintah.

Siapa pun bisa menjadi pelaku perencanaan bahasa, tetapi harus memperhatikan berbagai aspek yang menjadi syarat perencanaan bahasa. Menurut Moeliono (1985: 16) perencanaan bahasa dilakukan oleh individu maupun badan lembaga swasta atau atas nama pemerintah yang resmi mendapat tugas untuk melakukan pengembangan dan pembinaan bahasa. Perencanaan bahasa sebagai bahasa nasional di Indonesia pelakunya adalah pusat bahasa. Lembaga tersebutlah yang bertugas dan memiliki wewenang dalam merumuskan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan bahasa. Moeliono (1985:19) menjelaskan bahwa badan atau organisasi di luar pusat bahasa yang dapat mengambil peran sebagai pelaku perencanaan bahasa adalah angkatan bersenjata, badan peradilan, organisasi keagamaan, para penerbit, dan organisasi profesi.

Banyak ahli yang membahas perencanaan bahasa dengan menggunakan istilah lain. R. A. Hall Jr. (1951) menggunakan istilah 'politik bahasa' (*glottopolitics*) yang mengacu kepada penerapan ilmu linguistik oleh suatu negara untuk menentukan kaidah tertentu yang dipilih untuk mewujudkan keadaan dwi bahasa di dalam daerah jajahan yang mempunyai budaya yang berbeda. G.P Springer (1956) menggunakan istilah 'perekayasa bahasa' (*Language Engineering*) yang mengacu pada usaha pengabdian dan pembakuan bahasa yang belum baku di Uni Soviet. S.T Alisjahbana (1961) juga menggunakan istilah ini untuk mengacu pada aktivitas yang dilakukan secara sadar bagi pengembangan bahasa dalam konteks sosial, budaya, dan perubahan teknologi secara luas. Juga ada sarjana lain yang menggunakan istilah 'perekayasa bahasa' untuk mengacu

kepada aktivitas terencana melalui sekolah, gereja, radio, surat kabar, dan juga perencanaan resmi untuk mempengaruhi penggunaan bahasa. R. Noss (1970) menggunakan istilah 'pembangunan bahasa' (*Language Development*) dan perencanaan bahasa (*Language Planning*) di dalam pembicaraan mengenai keadaan penggunaan bahasa dalam pendidikan di Asia Tenggara.

Dalam kasus bahasa Indonesia yang sudah terbiasa dengan istilah perencanaan bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh E. Haugen. Dalam praktiknya, perencanaan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, sebagaimana konsep yang pernah disampaikan oleh J.V. Neustupny (1974), yaitu *perencanaan status* dan *perencanaan bahan*. Perencanaan status adalah perencanaan yang terkait dengan usaha peningkatan status bahasa Indonesia. Misalnya, pemberian status bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Setelah itu, ditingkatkan lagi statusnya menjadi bahasa pengantar pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa ilmu pengetahuan, bahkan sebagai bahasa budaya bangsa Indonesia. Perencanaan bahan adalah perencanaan yang terkait dengan aktivitas penyusunan ejaan, pembakuan ucapan, pembentukan istilah, penyusunan tata bahasa, penyusunan kamus, dan sebagainya. Semua langkah ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia (yang pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) dengan berbagai macam strategi dan kiatnya (Muslich dan Oka, 2010:20).

LATAR BELAKANG PERENCANAAN BAHASA

Pada umumnya suatu bahasa mempunyai masyarakat penutur. Dalam proyek perencanaan bahasa, penutur-penutur asli ini perlu dimintai pandangan dan pendapat karena golongan inilah yang akan menjadi pendukung utamanya. Mereka akan lebih bangga dan merasa dihargai jika ketika bahasa mereka dirancang, mereka diberikan kesempatan untuk bersuara mengenai bahasa mereka. Setiap masyarakat yang cinta akan bahasanya, mereka menginginkan bahasanya terancang, terkendali, terbina dan modern. Perencanaan bahasa juga bertujuan untuk mensinkronkan semua dialek yang terdapat dalam suatu negara. Dengan cara ini diharapkan negara itu hanya mempunyai satu bahasa rujukan untuk semua rakyatnya. Sinkronisasi ini dapat memperkecil pemakaian dialek kedaerahan yang bermacam-macam, karena diarahkan ke pemakaian bahasa yang seragam dan satu. Kalau keinginan ini tercapai, maka pembakuan dan pemodernan bahasa lebih mudah tercapai dan pada akhirnya dapat membentuk suatu masyarakat, satu bahasa, satu budaya, satu bangsa dan satu negara.

Perencanaan bahasa di suatu negara bisa mantap apabila status bahasa itu telah tercantum dalam undang-undang negara tersebut, baik sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa nasional. Menurut Fishman (1971) berpendapat bahwa perencanaan bahasa yang baik memerlukan penyelidikan bersifat ilmiah, empiris, praktis, padu dan *up to date*. Perencanaan bahasa jangan dilakukan secara, tergesa-gesa, dan tambal sulam,

karena perencanaan bahasa yang baik perlu valid, kredibel, dan objektif. Dengan cara demikian, hasilnya diharapkan sesuai dengan target yaitu perkembangan bahasa yang mantap, bahasa yang dapat menimbulkan rasa setia pemakainya, dan bahasa yang bisa menimbulkan "rasa memiliki" bagi pemakainya. Perkembangan dan kondisi bahasa yang demikian akan menghilangkan salah paham dan perpecahan karena semua pemakainya berbangga diri dengan satu bahasa.

Perencanaan bahasa dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan bahasa dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. Perencanaan bahasa dapat juga dilakukan oleh penjajah yang menjajah suatu daerah tertentu. Penjajah dapat juga menyebabkan penggunaan bahasa pada masyarakat tertentu berubah. Perubahan semacam itu banyak terjadi di negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Penjajah memaksakan penggunaan bahasanya terhadap penduduk atau negara yang dijajahnya. Banyak negara di Afrika jajahan Perancis menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa resmi, meskipun negara tersebut telah merdeka.

Pada abad ke-16, terdapat tiga bahasa yang digunakan di Inggris, yaitu bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa latin. Bahasa Inggris digunakan di rumah dan komunikasi umum, bahasa Perancis digunakan di parlemen dan pemerintahan, dan bahasa latin digunakan di gereja. Setelah itu, terjadi perubahan besar di Inggris (Jones, 1993). Pemerintah pada saat itu menetapkan strategi yang amat fundamental, yaitu bahasa Inggris harus digunakan di semua bidang dan ranah pemakaian, termasuk di parlemen dan di gereja. Dalam waktu relatif

singkat, pemakaian bahasa Perancis dan bahasa latin tersisih. Pada abad ke -18 dan 19 bahasa Inggris terus berkembang ke negara-negara jajahan Inggris. Hingga kini bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa dunia dan dipakai dalam komunikasi internasional.

Charles A. Ferguson (1977) dalam bukunya *language planning processes* memberikan ilustrasi, baik yang menyangkut karakteristik bahasa, pemakai bahasa, dan "sejarah pemaksaan" pemakaian bahasa oleh penguasa, yang pada garis besarnya sebagai berikut:

1. Bahasa itu dinamis sehingga menyebabkan bahasa itu hidup, berubah, dan berkembang. Bahasa itu aktif dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat pemakai bahasa tersebut.
2. Banyak pemakai bahasa yang sedikit banyak telah mempunyai pengetahuan tentang linguistik. Mereka dapat menilai dan menentukan apakah bahasa itu betul atau salah dalam penggunaannya. Mereka dapat memperkirakan apakah bahasa itu baik, tidak baik, enak didengar atau janggal ketika dipakai. Pada prinsipnya pemakai bahasa (penutur, penulis, pendengar, pembaca) dapat menilai apakah bahasa itu benar atau salah berdasarkan ilmu bahasa yang diketahuinya.

ASPEK PERENCANAAN BAHASA

Aspek perencanaan bahasa dapat dijadikan panutan dalam membuat ragam baku. Akan tetapi, tidak semua kata dapat dibakukan, contohnya: tanda baca dan ejaan hanya digunakan pada situasi tertentu. Ferguson (1966) dan Steward (1968) menyatakan bahwa ciri-ciri bahasa yang memudahkan masyarakat awam

untuk menerima perencanaan bahasa adalah sebagai berikut.

- 1) Bahasa itu adalah bahasa pribumi (penduduk asli) atau bahasa ibu negara itu;
- 2) bahasa itu pernah menjadi lingua franca dalam negara itu dan antarnegara tetangga;
- 3) bahasa itu berpotensi (kreatif dan fleksibel) untuk perkembangan pendidikan, agama, sastra, iptek dan media massa;
- 4) bahasa itu mempunyai budaya yang mantap dan agung;
- 5) sejarah bahasa itu mantap dan sah;
- 6) bahasa itu mempunyai banyak bahan dokumentasi untuk dikaji;
- 7) bahasa itu mempunyai pakar tradisional dan modern;
- 8) bahasa itu mempunyai kebijakan (*policy*) perencanaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang cinta bahasanya;
- 9) bahasa itu dihormati oleh pemakainya dan masyarakat pemakai kelompok lain;
- 10) bahasa itu ciri kebangsaan dan nasional;
- 11) bahasa itu mempunyai daya tarik yang memudahkan pemakainya taat dan setia kepadanya;
- 12) bahasa itu mudah memupuk persatuan bangsa dan negara.

Ferdinand de Saussure (1922) seorang tokoh bahasa Perancis berpendapat bahwa perencanaan bahasa perlu dilakukan secara berangsur-angsur dan berkesinambungan karena hal-hal berikut. 1) Budaya suatu masyarakat senantiasa berubah yang mengakibatkan bahasanya pun berkembang dan berubah; 2) bahasa perlu dirancang untuk menyediakan ruang daya cipta dan kreativitas individu; 3) perencanaan bahasa dapat membantu corak kepemimpinan bangsa; 4) pemerintah yang melaksanakan perencanaan bahasa berarti harus memelihara jiwa bangsanya; 5) perkembangan bahasa yang terencana dapat dijadikan bahasa nasional dan bahasa resmi; 6) perencanaan bahasa dapat menepis pengaruh negatif terhadap bahasa

tersebut; 7) bahasa yang terencana perkembangannya dapat dijadikan alat propaganda bangsa dan negara; 8) bahasa yang terencana perkembangannya dapat memupuk sentimen atau ideology bahasa tersebut; 9) bahasa yang terencana perkembangannya dapat menampung konsep atau ide baru yang muncul sejalan dengan perkembangan bahasa tersebut..

PERENCANAAN BAHASA DI INDONESIA

Kehadiran bahasa Indonesia mengikuti perjalanan panjang hingga akhirnya teretus inspirasi persatuan pemuda-pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi:

*Kami poetra dan poeteri Indonesia
mengakoe bertoempah darah
satoe,*

Tanah Air Indonesia.

*Kami poetra dan poeteri Indonesia
Mengakoe berbangsa satoe,
Bangsa Indonesia.*

*Kami poetra dan poeteri Indonesia
mendjoendjoeng bahasa
persatoean,*

Bahasa Indonesia

Dalam poin yang ketiga disebutkan bahwa "bahasa persatuan, bahasa Indonesia" dari situlah dianggap pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Sebelum teretusnya Sumpah Pemuda, bahasa Melayu dipakai sebagai *lingua franca* di seluruh kawasan Indonesia. Hal itu terjadi sudah berabad-abad sebelumnya. Dengan adanya kondisi yang semacam itu, masyarakat sama sekali tidak merasa bahwa bahasa daerahnya disaingi, di balik itu, mereka menyadari bahwa bahasa daerahnya tidak mungkin dapat dipakai sebagai perhubungan antar suku, sebab

yang diajak komunikasi juga mempunyai bahasa daerah tersendiri. Adanya bahasa Melayu sebagai *lingua franca* inipun tidak akan mengurangi fungsi bahasa daerah. Bahasa daerah dipakai dalam situasi kedaerahan dan tetap berkembang.

Hasil Perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1) lambang kebanggaan nasional, dapat memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia; 2) lambang identitas nasional, dapat diketahui siapa penuturnya, perangai, dan watak bangsa; 3) alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial dan bahasanya; 4) alat perhubungan antarbudaya antardaerah.

Bersamaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, diangkat pulalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Bab XV, Pasal 36. Hal-hal yang merupakan penentu keberhasilan pemilihan suatu bahasa sebagai bahasa negara apabila 1) bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar penduduk negara itu; 2) secara geografis, bahasa tersebut lebih menyeluruh penyebarannya, dan 3) bahasa tersebut diterima oleh seluruh penduduk negara itu.

Pada Hasil Perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional tanggal 25—28 Februari 1975 dikemukakan bahwa kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: 1) bahasa resmi kenegaraan, hal ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan RI 1945, keputusan-keputusan, dokumen-

dokumen, surat resmi; 2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bagi kelas rendah biasanya masih digunakan bahasa daerah karena mereka masih memahami bahasa ibu saja dan belum memiliki bahasa kedua; 3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antarbadan pemerintah dan penyebaran informasi kepada masyarakat; 4) bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

RAGAM BAKU

Bahasa Indonesia bukanlah sebuah sistem yang tunggal dan kaku karena bahasa Indonesia digunakan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Latar belakang pengguna yang berbeda tersebut menimbulkan variasi-variasi kebahasaan. Variasi kebahasaan tersebut menempati fungsi sosiolinguistik yang berbeda-beda. Ada ragam pokok tinggi yang bersifat resmi, ada pula ragam pokok rendah yang bersifat tidak resmi.

Bahasa sebagai alat komunikasi dalam situasi resmi perlu dilakukan standarisasi mengenai ketentuan-ketentuan khusus. Dalam proses standarisasi tersebut terdapat salah satu variasi yang diangkat untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu. Variasi tersebut dinamakan bahasa standar atau bahasa baku. Pembakuan bahasa atau standarisasi bahasa merupakan salah satu bentuk dari perencanaan bahasa. Mulyono (2011:1) menjelaskan bahwa pembakuan bahasa adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk merumuskan secara tertulis atau

mengodifikasi kosakata serta norma-norma suatu bahasa, baik norma ejaan maupun tata bahasa.

Moeliono (1985:92) mengemukakan bahwa ada dua norma yang digunakan dalam proses pembakuan bahasa. *Pertama* adalah norma yang dikodifikasi dalam bentuk buku tata bahasa sekolah dan yang diajarkan kepada siswa. *Kedua* adalah norma berdasarkan adat pemakaian (*usage*) yang belum dikodifikasi secara resmi dan yang dianut oleh kalangan media massa dan sastrawan muda. Hal ini berarti bahwa ada dua norma yang berbeda dan tidak saling berkaitan.

Pembakuan bahasa harus didasarkan pada kesejajaran antara usaha para ahli teori bahasa yang normatif dengan kalangan media massa dan sastrawan. Hal tersebut perlu dilakukan karena norma-norma tersebut memiliki potensi besar terhadap pengembangan bahasa sehingga mencapai keseragaman bahasa yang menjadi esensi dari ragam baku. Hal tersebut seperti penjelasan Moeliono (1985:95) yang mengatakan bahwa ragam baku ialah ragam yang diterima di kalangan masyarakat yang luas dan yang mengizinkan modifikasi kecil disana-sini. Keseragaman ragam baku bisa diartikan dengan kemantapan atau kestabilan yang luwes.

Pembakuan atau standarisasi bahasa dapat diselenggarakan oleh badan pemerintah resmi atau organisasi swasta. Di Indonesia, badan pemerintah yang ditugasi kodifikasi pembakuan bahasa adalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Hal ini karena lembaga tersebutlah yang memiliki wewenang dalam perencanaan bahasa yang di dalamnya juga termasuk usaha pembakuan bahasa.

Konsep Ragam Bahasa Baku

Halim (dalam Chaer, 2010:192) menjelaskan mengenai pengertian dari ragam bahasa baku, yaitu "ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat pemakainya sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya". Jadi, ragam bahasa baku Indonesia merupakan ragam bahasa baku yang telah dilembagakan dan diakui oleh masyarakat Indonesia untuk digunakan dalam situasi resmi dan mempunyai rujukan kaidah dalam menggunakan bahasa Indonesia.

Ciri Ragam Bahasa Baku

Ragam bahasa baku memiliki beberapa ciri sebagaimana yang disebutkan Chaer (2010:193) yaitu (a) kemantapan yang dinamis, (b) kecendikiaan, dan (c) kerasionalan. Adapun penjelasan setiap ciri ragam baku tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Kemantapan yang Dinamis. Wujud dari ciri kemantapan yang dinamis adalah berupa aturan dan kaidah yang tetap. Namun, kemantapan kaidah itu cukup luwes sehingga dapat menerima kemungkinan perubahan dan pengembangan yang bersistem, baik di bidang kaidah gramatikal maupun di bidang kosakata, peristilahan, dan berbagai ragam gaya di bidang sintaksis dan semantik.
2. Kecendikiaan mengacu pada bahasa baku harus diupayakan agar bahasa tersebut dapat digunakan untuk membicarakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan modern. Kecendikiaan ini dapat dilakukan dengan memperkaya kosakata dalam segala bidang kegiatan dan keilmuan.
3. Kerasionalan bahasa baku tampak dalam penggunaan bahasa, baik di bidang kosakata maupun struktur sintaksis. Kosakata dengan makna yang paradoksial dan kontroversial tidak mencerminkan kerasionalan.

Tahap-Tahap Pembakuan Bahasa

Alwasilah (dalam Mulyono, 2011:1) memaparkan bahwa pada dasarnya pembakuan bahasa terdiri atas empat tahap, yaitu sebagai berikut. (1) Tahap seleksi dan indentifikasi. Tahap ini dilakukan untuk menentukan sistem ejaan, kosakata, dan tata bahasa yang cenderung digunakan masyarakat pada saat mereka berbahasa. Langkah seleksi akan menentukan ragam bahasa yang akan dijadikan sumber pembakuan dan juga mengidentifikasi kecenderungan masyarakat dalam menggunakan bahasa yang perangkatnya akan dibakukan itu. Chaer (2004:195) menjelaskan bahwa pada umumnya yang layak dianggap baku saat masuk tahap seleksi adalah ujaran dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan paling besar kewibawaannya. Seperti para pejabat negara, para guru, warga media massa, alim ulama, dan cendekiawan. (2) Tahap kodifikasi, tahap kodifikasi merupakan tahap kegiatan inti. Hasil studi ditahap seleksi dan indentifikasi dicatat atau dirumuskan secara tertulis. Kosakata, baik makna dasar maupun penggunaannya dirumuskan dalam kamus atau brosur. Menurut Moeliono (1985:95) kodifikasi mencakup pedoman ejaan, buku tata bahasa, kamus baku, atau kamus istilah yang berperan membantu pemantapan kaidah dan norma bahasa. (3) Tahap elaborasi, menyangkut kegiatan penggarapan secara cermat dan teliti. Penggarapan hasil kodifikasi menyangkut

penyebarluasan kepada seluruh pengguna bahasa melalui diskusi, penyuluhan, penataran, seminar, pendidikan bahasa, dan yang lainnya. Melalui kegiatan elaborasi ini diharapkan para pengguna bahasa tidak hanya mengetahui dan memahami kaidah-kaidah hasil kodifikasi namun juga mampu dan berkeinginan untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan berbahasa sehari-hari. (4) Tahap akseptansi, tahap akseptansi disebut sebagai inti pembakuan bahasa yang kedua setelah kodifikasi, yakni tahap penerimaan hasil kodifikasi oleh pihak pengguna bahasa. Dalam situasi yang relevan pengguna bahasa diharapkan menggandrungi bahasa yang sesuai dengan norma-norma yang terkodifikasi itu. Jika sikap tersebut muncul di kalangan pengguna bahasa maka pembakuan itu telah berhasil. Sebaliknya, kalau pengguna bahasa tidak menunjukkan gejala-gejala perubahan ke arah yang sejalan dengan hasil kodifikasi, maka sampai batas-batas tertentu, pembakuan itu kurang berhasil.

FUNGSI BAHASA BAKU SEBAGAI BAHASA NASIONAL

Ada empat fungsi bahasa baku, yakni fungsi pemersatu, fungsi pemberi kekhasan, fungsi pembawa wibawa, dan fungsi sebagai kerangka acuan (Moeliono, 1985:110). Penjelasan mengenai fungsi bahasa baku sebagai bahasa nasional adalah sebagai berikut. (1) Fungsi Pemersatu. Bahasa baku menghubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Bahasa baku mempersatukan masyarakat tutur menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur (orang seorang) dengan seluruh masyarakat itu. (2) Fungsi Pemberi Kekhasan. Bahasa baku membedakan suatu bahasa dengan bahasa

lain. Bahasa baku dalam bahasa Indonesia, bisa memberikan ciri khas dan sebagai pembeda dengan bahasa melayu lainnya. (3) Fungsi Pembawa Wibawa. Bahasa baku membawa serta wibawa atau prestise. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa bahasa baku atau bahasa nasional memiliki prestise lebih tinggi dari ragam bahasa lainnya. (4) Fungsi sebagai Kerangka Acuan. Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah (yang dikodifikasi) yang jelas. Bahasa baku juga menjadi kerangka acuan bagi fungsi estetika bahasa yang tidak saja terbatas pada bidang sastra, tetapi juga mencakup segala jenis pemakaian bahasa yang menarik perhatian karena bentuknya yang khas.

KESIMPULAN

Perencanaan bahasa adalah sebuah usaha untuk melestarikan bahasa seperti memperbanyak kosa kata, ejaan, dan membuat kamus. Sebenarnya istilah perencanaan bahasa sudah ada sejak lama, tetapi banyak ahli yang menyebutnya dengan nama yang berbeda misalnya politik bahasa dan perekayasaan bahasa. Perencanaan dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun perseorangan atau lembaga yang telah ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan.

Kriteria bahasa yang dijadikan bahasa resmi suatu negara meliputi: 1) Bahasa itu adalah bahasa pribumi (penduduk asli) atau bahasa ibu negara itu; 2) bahasa itu pernah menjadi lingua franca dalam negara itu dan antarnegara tetangga; 3) bahasa itu berpotensi (kreatif dan fleksibel) untuk perkembangan pendidikan, agama, sastra, iptek dan media massa; 4) bahasa itu mempunyai budaya yang mantap dan agung; 5) sejarah bahasa

itu mantap dan sah; 6) bahasa itu mempunyai banyak bahan dokumentasi untuk dikaji; 7) bahasa itu mempunyai pakar tradisional dan modern; 8) bahasa itu mempunyai kebijakan (*policy*) perencanaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang cinta bahasanya, 9) bahasa itu dihormati oleh pemakainya dan masyarakat pemakai kelompok lain; 10) bahasa itu cirri kebangsaan dan nasional; 11) bahasa itu mempunyai daya tarik yang memudahkan pemakainya taat dan setia kepadanya; 12) bahasa itu mudah memupuk persatuan bangsa dan negara.

Perencanaan bahasa di Indonesia di mulai adanya Sumpah Pemuda yang dalam teksnya di butir ketiga menyebutkan bahwa "*bahasa persatoean, bahasa Indonesia.*" Mulai saat itulah banyak perombakan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya memperbaiki ejaan, kosa kata, dan pembuatan kamus. Bahasa negara perlu dibedakan dengan bahasa resmi. Jika bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang digunakan pada situasi apapun, maka bahasa resmi digunakan pada konteks formal yang menggunakan ragam baku.

DAFTAR RUJUKAN

- Muslich, M. & Oka, I.G.N. 2010. *Perencanaan Bahasa pada Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardhaugh, Ronald 2006. *An Introduction to Sociolinguistics*. United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Moeliono, A.M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Mulyono, Iyo. 2011. *Cerdas Bahasa Cerdas Komunikasi: Bahasa*